



MAFIA tanah memang pasti melibatkan oknum di Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota, serta di provinsi.

Modus baru mafia tanah melalui proses pengalihan mafia tanah yang diakui proses penerbitan serta melibatkan beberapa instansi ternama bahkan pejabat Kantor Pertanahan,

Adapun modus para oknum mafia tanah lainnya, yakni mengubah identitas data yuridis korban menjadi milik orang lain dan

bisa merebut tanah yang bukan haknya dengan data palsu.

Selain itu, ada juga lokasi yang sudah bersertifikat dibuat pembanding dan menggunakan modus paling canggih yakni ilegal akses yang berhasil ditembus para mafia.

Para mafia tanah memanfaatkan kurang pemahaman masyarakat yang tidak sadar sebagai korban. Korban modus operandi mafia tanah ini mulai dari pemerintah,

pengusaha, hingga masyarakat.

Sehingga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya membantu masyarakat malah terhambat karena oknum tak bertanggung jawab.

Sehingga dibutuhkan dorongan nyata Satu Tugas Anti Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beserta pihak berwenang lainnya untuk memberantas hal tersebut. **(aju)**